KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

			FINAL/HDAK FINAL					
KEMENTERIAN KEHANGAN RI			H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 7 0 2			H.4 X	Final	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			H.5 .	Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG								
A.1 NPWP : 68 327 768 5 722 001								
A.2 NIK :								
A.3 Nama : RINA HERAWATI								
B. PPh PA	SAL 21 YANG D	IPOTONG						
MASA PA (mm-yy	.	BJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	E	3.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
4	21-4	02-01	1.805.100	1.805.100	0	5	90.255	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota								
3.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 046/SP2D-LS/BLUD-RSJDAHM/IV/2022								
		Nama Dokum						
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
Nomor: Tanggal dd mm yyyyy							уууу	
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :								
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK								
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :			9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0					
C.2 Nam	a Instansi Pemerin	tah :	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					
C.3 ID Subunit Organisasi :								
C.4 Tanggal :		2 8 dd 0 4 mm	2 0 2 2 <i>yyyy</i>					
C.5 Nama Penandatangan :			HARI JUMADI					
C.6 Pernyataan Wajib Pajak :			Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.					
			Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diper	j berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	mengatur bahwa dok	cumen ini tela	ah ditandatangani secara	

HUSX77WM